

Rekomendasi Kebijakan

Bersama dengan jaringan organisasi perempuan, WRI melakukan sosialisasi dan advokasi kepada stakeholder yang terkait dengan legislasi RUU KKG. Berikut merupakan rekomendasi WRI terhadap proses penyusunan RUU KKG:

- ◆ Meminta DPR-RI untuk membahas RUU KKG secara terbuka dan menampilkan jadwal kegiatan pelaksanaan sidang/rapat di website DPR-RI, agar masyarakat sipil dan kekuatan ekstra parlemen lainnya dapat memberikan dukungan dan pengawasan pada proses legislasi RUU KKG.
- ◆ Meminta anggota DPR-RI untuk memaksimalkan tiga fungsi DPR-RI yaitu legislasi, pengawasan dan penganggaran dalam substansi RUU KKG. DPR-RI diharapkan menghasilkan kebijakan publik yang memperhatikan konsep kesetaraan dan keadilan gender melalui komunikasi yang baik antara organisasi ekstra parlemen. Dalam fungsi penganggaran dan pengawasan, meminta DPR-RI menjamin adanya mekanisme monitoring dan evaluasi untuk memperhatikan dan mengawasi perencanaan dan penggunaan anggaran (APBN) yang responsif gender tercantum di dalam RUU KKG.
- ◆ Meminta DPR-RI untuk memastikan terjaminnya pemenuhan dan penghormatan hak asasi perempuan yang menjadi tanggungjawab seluruh pihak baik eksekutif, legislatif, yudikatif maupun partai politik, juga lembaga swadaya masyarakat dan warga negara perseorangan.
- ◆ Meminta DPR-RI untuk aktif berkomunikasi dengan jaringan organisasi perempuan yang rutin mengawal dan mengikuti rangkaian kegiatan di DPR-RI. Juga aktif mengikuti diskusi rutin yang dilakukan organisasi ekstra parlemen, baik yang menghadirkan anggota DPR-RI maupun tidak, untuk kemudian bersama-sama merumuskan substansi RUU KKG.
- ◆ Meminta Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP-RI) agar secara aktif dan terus menerus mendayagunakan potensinya sebagai medium dalam pengawasan dan pemantauan legislasi RUU KKG. KPP-RI diharapkan dapat bersinergi dengan kekuatan ekstra parlemen dalam melakukan sosialisasi terhadap kebijakan yang responsif gender, terutama legislasi RUU KKG, melalui keikutsertaan dan keterbukaan dalam kegiatan-kegiatan diskusi yang diselenggarakan oleh jaringan organisasi perempuan.

Catatan Akhir

- ¹ Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) merupakan indikator komposit yang terdiri dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan perkapita. Indeks Ketimpangan Gender merupakan indikator komposit yang terdiri dari kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan partisipasi tenaga kerja.
- ² Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya.
- ³ BKKBN. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI). 2007.
- ⁴ Merupakan istilah fisika yang dipinjam oleh Drude Dahlerup untuk mendorong adanya tindakan afirmasi atau proporsi kritis yang diyakini dapat merubah institusi politik sebesar 30-40% kuota. Lihat <http://www.quotaproject.org/aboutQuotas.cfm>
- ⁵ UNDP, Human Development Index (Value), <http://hdrstats.undp.org/en/indicators/103106.html>.
- ⁶ Badan Legislasi. *Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-undang Prioritas Tahun Anggaran 2012*.

Penelitian ini dibuat atas dukungan dari Rakyat Amerika melalui Badan Bantuan Pembangunan Internasional Amerika (USAID) dan Program Representasi. Pandangan yang dinyatakan dalam penelitian ini semata-mata merupakan tanggungjawab dari Women Research Institute (WRI) dan tidak mencerminkan pandangan USAID.

Daftar Pustaka

- Badan Legislasi DPR RI. 2012. *Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-undang Prioritas Tahun Anggaran 2012*.
- BPS. 2010. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2007.
- BPS. 2013. <http://mdgs-dev.bps.go.id> (diakses 18 Januari 2013 Pkl.10.58 WIB).
- BPS. Indikator Angka Kematian Ibu (AKI). <http://mdgs-dev.bps.go.id> (diakses 18 Januari 2013 Pkl.10.58 WIB).
- Martiany, Dina. *Pro dan Kontra RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender*. Info Singkat Kesejahteraan Sosial Vol. IV, No. 10/II/P3DI/Mei/2012.
- Phillips, Anne. 1995. *The Politics of Presence*. Oxford Clarendon Press. Chapter 2.
- Pitkin, Hanna F. 1967. *The Concept of Representation*. University of California Press.
- The Jakarta Post, *Gender Equality Bill Opposed by Women*, (June 19, 2012).
- The Jakarta Globe, *Indonesia Islamists Stall Gender Equality Bill*, (May 9, 2012).
- UNDP, Human Development Index (Value), <http://hdrstats.undp.org/en/indicators/103106.html> (diakses 22 Agustus 2013).

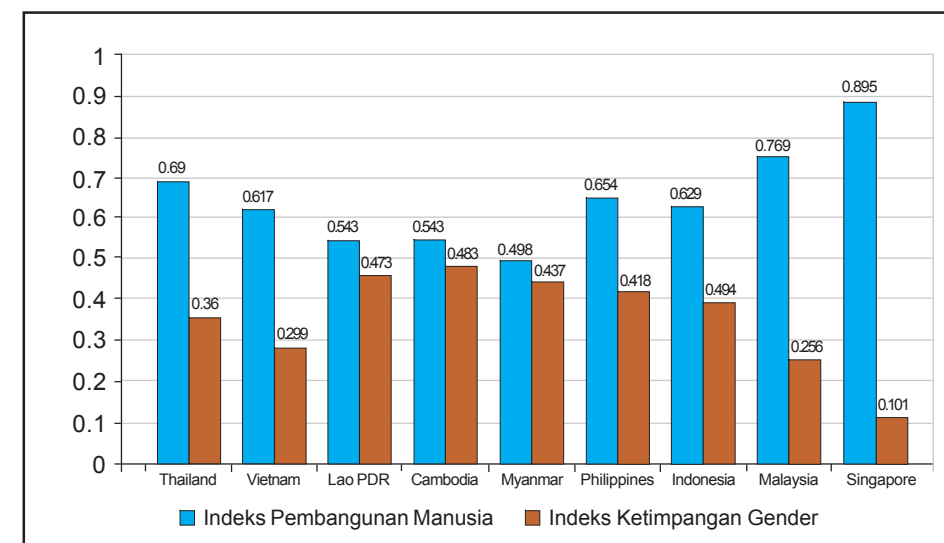
Representasi Politik Perempuan & RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender

Pola relasi perempuan dan laki-laki dalam kebijakan publik masih menunjukkan ketimpangan yang cukup besar. Indeks Pembangunan Indonesia/IPM (Human Development Index/HDI)¹ dan Indeks Ketimpangan Gender/IKG mengalami penurunan, namun beberapa indikator terkait kesejahteraan perempuan tetap rendah (lihat gambar 1).

Salah satu indikator kesejahteraan perempuan adalah Angka Kematian Ibu (AKI) dan jumlah kursi yang diduduki oleh perempuan di parlemen. AKI² di Indonesia berada pada angka 228/100.000.³ Sementara persentase representasi politik perempuan di parlemen belum mencapai *critical mass*⁴ sebesar 30 persen. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) masih 18 persen, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) sebesar 27 persen, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Provinsi Republik Indonesia (DPRD-RI) sebesar 13 persen.

Pada tabel 1 menunjukkan peningkatan representasi politik perempuan sejak Pemilihan Umum 1999-2009 juga diikuti dengan penurunan AKI. Hal ini menunjukkan bahwa representasi simbolik dan representasi deskriptif perempuan anggota DPR-RI berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Gambar 1.
Posisi Indeks Pembangunan Indonesia di antara negara-negara ASEAN⁵



Kesetaraan antara perempuan dan laki-laki merupakan kunci penting mengatasi kemiskinan dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera

Policy Brief

September 2013

Panel Ahli

Edriana Noerdin, MA
Sita Aripurnami, MSc

Peneliti

Ayu Anastasia, S.Sos
Frisca Anindhita, SKM
Rahayuningtyas, SKM

Women Research Institute

Lembaga penelitian yang memfokuskan kerjanya dengan menggunakan analisis feminis
Jalan Kalibata Utara II No. 78
Jakarta Selatan - 12740
Tel. (62-21) 791.87149
Fax. (62-21) 798.7345
Email. office@wri.or.id
Website. www.wri.or.id

Tabel 1.
Perbandingan Jumlah Anggota DPR-RI Perempuan dengan Angka Kematian Ibu

Aleg Perempuan	AKI	Aleg Perempuan	AKI	Aleg Perempuan	AKI
1999	1997	2004	2003	2009	2007
9%	334	11%	307	18%	228

Women Research Institute (WRI) sejak Agustus 2012 melakukan penelitian kebijakan mengenai Anggota DPR-RI Perempuan dan Kebijakan Kesetaraan Gender. Sebagai bagian dari penelitian tentang keterwakilan politik perempuan, ringkasan kebijakan ini menunjukkan pentingnya Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG). RUU KKG merupakan kebijakan alternatif untuk mengoreksi ketimpangan gender dan untuk membuka ruang partisipasi dan akses perempuan dalam politik.

Temuan Penelitian dan Analisis

1. Kebijakan Pendorong Representasi Politik Perempuan

Representasi politik perempuan berpengaruh pada arah demokrasi Indonesia yang lebih inklusif. Peningkatan jumlah anggota legislatif perempuan di DPR-RI memberikan peluang masuknya isu-isu perempuan sebagai prioritas.

Telah ada kebijakan yang mendorong kesetaraan gender dalam kehidupan politik dan publik, salah satunya UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan

Umum. Namun, masih banyak tantangan dan hambatan dalam mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia. Meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan Komnas Perempuan sebanyak 13,32 persen (dari angka 105.103 menjadi 119.107) dan tren kekerasan di komunitas menjadi salah satu indikasi lemahnya representasi perempuan di kehidupan publik dan politik. Selain itu, representasi politik perempuan yang belum mencapai titik minimum 30 persen serta dampaknya terhadap persoalan kesejahteraan juga menjadi indikator perlunya perubahan dalam kebijakan.

Tindakan khusus sementara melalui kuota 30 persen (pasal afirmasi UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum) diapresiasi sebagai bentuk komitmen negara dalam menjamin hak sipil dan politik perempuan. Keterlibatan perempuan di politik juga didukung oleh laki-laki anggota DPR-RI manakala perempuan maju menjadi caleg. Perdebatan muncul ketika partai politik kesulitan memenuhi dan berdampak pada hilangnya kesempatan caleg perempuan di dapil. Peningkatan jumlah perempuan anggota DPR-RI harus diselaraskan dengan kualitas dan kredibilitasnya di parlemen. Fraksi-fraksi di

DPR-RI secara rutin melakukan pengawasan dan evaluasi untuk menjaga kualitas dan kredibilitas anggotanya.

Menjaga dan meningkatkan representasi politik perempuan, diperlukan kebijakan afirmatif yang melengkapi kebijakan-kebijakan sebelumnya. RUU KKG yang sedang dibahas DPR-RI merupakan momentum yang tepat sebagai kebijakan afirmatif. RUU KKG dapat menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam menghasilkan kebijakan yang responsif gender.



Repro: beritajateng.co

2. RUU KKG: Harapan Bagi Perwujudan Kesetaraan Gender di Indonesia

Ditetapkannya RUU KKG sebagai salah satu RUU Prioritas DPR-RI pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas)⁶ didukung penuh oleh WRI sebagai investasi terhadap reformasi peraturan progresif di Indonesia. Namun terdapat reaksi beragam dari anggota DPR-RI terhadap adanya RUU KKG. Sebagian mendukung secara penuh dan yang lainnya memberikan dukungan dengan beberapa persyaratan, seperti tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, tidak menimbulkan kontroversi dan harus melibatkan laki-laki dalam proses mengadvokasi. Masuknya RUU KKG dalam Prolegnas diapresiasi sebagai inisiatif yang baik untuk menguatkan imple-

mentasi dari kebijakan kesetaraan gender yang sudah ada.

Sementara respon kontra yang muncul dari anggota DPR-RI adalah isu efektivitas dan efisiensi yang mencakup sumberdaya manusia, tenaga dan uang dalam proses legislasi, serta kemungkinan implementasi di lapangan. Pembuatan suatu Undang-undang yang menghabiskan sumberdaya yang tidak sedikit menjadi *concern* anggota DPR-RI. Terdapat pula anggota DPR-RI perempuan yang berpandangan bahwa RUU KKG belum merupakan prioritas dibandingkan RUU lainnya, sementara terdapat pula anggota DPR-RI laki-laki yang berpandangan bahwa tanpa adanya RUU KKG juga sudah menjadi kewajiban semua orang untuk menerapkan kesetaraan gender.

Representasi politik perempuan berpengaruh pada arah demokrasi Indonesia yang lebih inklusif. Peningkatan jumlah anggota legislatif perempuan di DPR-RI memberikan peluang masuknya isu-isu perempuan sebagai prioritas.



Repro: kompasiana.com

Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG) merupakan kebijakan alternatif untuk mengoreksi ketimpangan gender dan untuk membuka ruang partisipasi dan akses perempuan dalam politik.